

[id.linkedin.com](https://id.linkedin.com)

# Merumuskan dan Menikmati Identitas | Mohamad Burhanudin | Pulse

*Mohamad Burhanudin*

33-42 minutes

---

## Sebuah Resensi

Oleh: Mohamad Burhanudin

Begitu diluncurkan sekitar pertengahan 2015 lalu, buku *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (selanjutnya cukup disebut *Identitas dan kenikmatan*) langsung mendapat sambutan hangat publik pencinta buku di Tanah Air. Resensi buku karya Ariel Heryanto (Profesor pada School of Culture, History and Language, The Australian National University) ini dengan segera menghiasi halaman media-media arus utama, media komunitas, maupun blogger. Diperbincangkan di media-media sosial hingga acara-acara bedah buku di berbagai kota di Indonesia.

Sambutan antusias tersebut tak lepas dari dua hal. Pertama, buku ini muncul pada saat yang tepat, di mana persoalan politik identitas tengah mengemuka, khususnya sejak Pemilihan Umum 2014. Meski sebenarnya *Identitas dan Kenikmatan* tak berbicara tentang fenomena politik pascapemilu 2014, namun substansi buku ini menawarkan begitu banyak bahasan yang hampir semuanya menjadi isu-isu yang kerap diperdebatkan dalam setahun terakhir, mulai Islam politik dan komodifikasi/komersialisasi nilai-nilai Islam, seputar isu peristiwa

pembantaian 1965 dan karya-karya tentangnya, politik pribumi dan non-pribumi, demam K-Pop yang masih bertahan, hingga tentang kian menguatnya peran media digital.

Kedua, sejak Era Reformasi bergulir, sangat jarang akademisi yang meneliti dan menulis buku tentang budaya populer yang hadir seiring proses demokratisasi di Indonesia. Ariel Heryanto merupakan satu dari sedikit akademisi, yang secara konsisten membabar persoalan identitas dan budaya populer di Indonesia Pasca-Orde Baru. Buku *Identitas dan Politik* ini pun dapat dikatakan sebagai edisi penajaman dari buku *Budaya Populer di Indonesia: Mencairnya Identitas Pasca Orde Baru* yang disunting oleh Ariel dan diluncurkan dua tahun sebelumnya.

Seperti dikatakan Ariel dalam kalimat pembuka bab 1, buku ini membahas bagaimana sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya kelas menengah muda perkotaan, mencoba merumuskan ulang identitas mereka usai jatuhnya Rezim Orde Baru pada 1998. Disebutkan pula, bab-bab buku ini berisi kisah perjuangan yang sulit tapi menggairahkan kaum muda kelas menengah perkotaan dan para profesional ketika mereka berakrobat dengan urusan serius menegosiasikan (memperbaiki, merumuskan ulang, menegaskan) atau mentransformasikan identitas sosial mereka yang sudah lama diakrabi dengan kebebasan yang baru didapatkan, serta upaya memburu berbagai usaha baru yang mengasyikkan, sekaligus cita-cita pribadi (hal. 27)

Tak ada pilihan lain bagi kebanyakan rakyat Indonesia selain menerima propaganda, penyeragaman, dan pemaksaan identitas tunggal selama masa Soeharto berkuasa. Reformasi 1998 kemudian menghadirkan ledakan energi besar dan emosional yang tiba-tiba berhamburan sesudah periode panjang ketertiban yang dipaksakan lewat ketakutan dan penampilan pura-pura di

permukaan itu. Semangat membangun ulang diri sebagai bangsa terhormat, dan modern pun mengembang. Situasi ini, menurut Ariel, mirip dengan apa yang terjadi pada dekade pertama kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Optimisme merebak luas pada periode awal Reformasi. Euforia penuh gempita membahana di banyak bidang, meski kemudian dengan segera diikuti kebingungan, kekecewaan, dan keputusasaan. Namun, upaya kreatif terus berjalan, khususnya seiring ekspansi industri media, baik nasional maupun global.

Pertarungan ideologis untuk mengisi kekosongan posisi hegemonik terjadi di arena budaya populer, terutama oleh kaum muda perkotaan yang tengah melonjak jumlahnya. Mereka mewakili kelas menengah yang paling aktif. Meski secara jumlah hanya sebagian kecil dari 220 juta penduduk Indonesia, suara mereka paling nyaring terdengar di ruang publik, sehingga selain menonjol dalam pertarungan budaya pop, mereka juga menjadi incaran favorit elite politik dan ekonomi. Secara komposisi mereka beragam, namun umumnya mempunyai keseragaman pada tingkat pendidikan, pola konsumsi, selera budaya, dan ketertarikan terhadap isu-isu nasional maupun internasional. Atas alasan-alasan tersebut, Ariel menempatkan kelas menengah muda perkotaan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi fokus kajian. (hal. 3-4)

Budaya populer menjadi konsep utama dalam melihat bagaimana identitas berkembang, berkontradiksi, dirayakan, saling unjuk, hingga menghaturkan kenikmatan bagi masyarakat di generasi ini. Budaya populer di sini dipahami sebagai sesuatu yang hadir dengan penciptaan, mandiri, bukan sekadar efek samping industrialisasi. Bukan pula sesuatu yang dangkal, pinggiran, residual, rendah, dan hingga semena-mena dipertentangkan dengan budaya adiluhung, seperti yang selama

ini kerap dilakukan oleh kaum elite, dan bahkan kaum intelektual.

Pandangan negatif terhadap budaya populer tersebut menjelaskan mengapa hingga kini masih sangat sedikit kajian tentang hal ini di Indonesia, di samping masih adanya bias maskulin, serta lebih terpakunya kerangka kajian intelektual negeri ini pada modernisasi dan pembangunan negara-bangsa. Selain itu, sudah terlalu lama orientalisme dan esensialisme dalam kajian tentang Indonesia oleh peneliti asing maupun lokal, yang lebih suka memahami aspek eksotik Indonesia, sejalan dengan imajinasi kolonial tentang penduduk pribumi “asli”. Akademisi cenderung kurang tahu bagaimana menghadapi objek yang menjadi kesukaan jutaan orang di negeri ini.

Perendahan semacam itu tak patut terjadi lagi mengingat kian menguatnya pemahaman konsep-konsep humanis dalam melihat budaya pada beberapa waktu terakhir, seperti penghargaan terhadap liyan, perbedaan, dan penentangan terhadap oposisi biner. Tayangan infotainment di televisi, misalnya, tak semestinya sekadar dilihat sebagai acara yang mematikan intelektual, tapi juga harus dapat dijadikan kajian dalam ranah antropologis atau mungkin postmodernisme. Pemisahan maskulin dan feminin sudah usang. Hal semacam itu juga sulit dipertahankan lagi mengingat kian luasnya penyebaran budaya layar di berbagai perangkat digital. Politik identitas, sebut Ariel, semakin sulit dipisahkan dari tuntutan budaya massa akan kegembiraan dan hiburan, serta legitimasi bagi kenikmatan hidup yang bersifat feminin. Semua hal dengan mudah terpapar kepada publik serta mendapat tanggapan yang beragam.

Meski begitu, Buku Ariel ini mengaji politik identitas dan kenikmatan secara lebih spesifik dalam budaya layar mutakhir di Indonesia, khususnya dalam sinema dan sinetron. Budaya layar dalam kajian ini dapat dipahami sebagai bagian dari pranata dan

praktik sosial yang lebih luas yang secara umum disebut budaya populer (hal. 21).

Walaupun fokus pada pembentukan identitas politik budaya populer pada masa setelah 1998, buku ini meyakini bahwa hal tersebut tak terjadi secara tiba-tiba. Sebab, perubahan menuju identitas baru tersebut telah dimulai beberapa tahun sebelum kejatuhan resmi Orba. Bahkan, budaya populer yang tumbuh dan berkembang di era setelah rezim otoritarian tersebut, tak bisa dilepaskan dengan bagaimana Orba itu sendiri terbentuk dan mengejawantahkan diri. Rezim tersebut lahir dari penyalpahan dan penghancuran begitu banyak budaya dari periode sebelumnya, terutama sejak tahun 1965, seperti komunisme. Lalu, selama kurun waktu 32 tahun, rezim ini membungkam ekspresi-ekspresi budaya yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan, serta menyusun sejarah Indonesia versi mereka dengan menghapus begitu banyak aspek-aspek rumit yang dianggap tak menyenangkan. Tak pelak, generasi setelah 1998 pun mewarisi wawasan sejarah yang bermasalah ini. Situasi amnesia sejarah tersebut yang membuat begitu kerasnya perdebatan historis di masa kini, khususnya ketika mendiskusikan sejarah-sejarah masa lalu yang telah dihapus atau ditulis ulang oleh Orba, seperti tentang Peristiwa 1965 (hal.10-11)

*Identitas dan Kenikmatan* tak diarahkan sebagai ensiklopedi ataupun kajian holistik tentang budaya populer di Indonesia. Ini merupakan studi etnografi tentang politik identitas dan kenikmatan pada kelas menengah urban di Indonesia dalam budaya layar (sinema, televisi, internet, dan media sosial) mutakhir,. Ada banyak isu dibeberkan di buku ini, yang terinci dari bab 2 hingga bab 8. Di antaranya, isu (post) islamisme dalam film dan tren busana muslimah, wacana seputar peristiwa

1965 dalam film, persoalan identitas Tionghoa dalam film, demam K-Pop dan asianisasi kaum perempuan, serta ditutup dengan budaya populer dalam Pemilu 2009. Tulisan ini tak akan merinci satu per satu isu yang dituturkan dalam tujuh bab tersebut, namun hanya akan mencuplik secara sekilas dari isu tersebut yang secara subyektif dianggap menarik atau menonjol.

## **Post-Islamisme**

Islamisasi memiliki sejarah panjang di Indonesia. Namun, sempat mengalami represi kuat pada awal Orde Baru karena dianggap sebagai kekuatan politik yang membahayakan. Sejak awal 1990-an, islamisasi tumbuh kembali. Setelah Soeharto runtuh pada 1998, islamisasi itu tumbuh sangat dramatis dibanding periode sebelumnya. Tak hanya dalam politik, tetapi juga bagaimana ketaatan akan keislaman yang sangat terpecah-pecah itu pada akhirnya bisa hadir dalam sejarah kapitalisme industrial Indonesia yang spesifik, seperti dalam maraknya tayangan islami dan berkembangnya industri jasa serta produk yang berhubungan dengan keislaman.

Mengutip Daromir Rudnycky, dalam buku tersebut Ariel menyebutkan, gerakan terbaru dalam ketakwaan agama Islam—yang sama sekali tidak seragam dan tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai konsumerisme hedonistik dengan tampilan agama. Hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari kerja keras, disiplin, dan penghormatan kosmopolitan terhadap orang lain di dunia (hal.39)

Ariel menghindari menyebut fenomena tersebut sebagai komersialisasi vs islamisasi. Dia memilih mengadopsi konsep Asef Bayat tentang post-islamisme sebagai kerangka alternatif guna menganalisis budaya populer di Indonesia terkait dengan islamisasi ini. Perspektif post-islamisme menawarkan kerangka

alternatif yang menyoroti gesekan-gesekan mendalam pada komunitas Muslim yang taat, serta transformasi mereka yang bersifat spesifik (hal. 39-40). Intinya, ada transformasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya sekuler. Sehingga, terbentuk sebuah pola yang “tidak anti-Islam, tak juga non-islami, dan tidak pula sekuler” (hal.59).

Dalam sinema, hal tersebut tampak dalam film *Ayat-Ayat Cinta* yang meledak dan sukses besar dengan menarik 3 juta penonton dalam pekan-pekan pertamanya. Jumlah penonton yang belum pernah dicapai oleh film nasional bergenre apapun di Indonesia, hingga setahun kemudian muncul *Laskar Pelangi* (2008). Banyak akademisi dan pengamat menyebut kesuksesan film yang diadaptasi dari novel islami karya Habiburrahman el Shirazy tersebut sebagai titik balik hadirnya budaya populer Islam di dalam film. Melalui film ini, Muslim generasi baru menemukan cara mendamaikan hal-hal yang secara tradisional dipandang bertolak belakang, yang membuat mereka mampu terlibat dalam agama dan budaya populer secara bermakna dan sungguh-sungguh (hal. 47).

Meski sebenarnya, berdasarkan penelitian lebih jauh atas proses pembuatan di balik layar memperlihatkan bahwa *Ayat-Ayat Cinta* telah mengalami pencampuradukkan besar-besaran dan tidak semata-mata bersifat islami. Film ini dibuat berdasarkan sebuah novel yang laris, dalam prosesnya materi tersebut dialihkan dari ketakwaan post-islamisme yang didaktik kepada versi ketakwaan yang lebih liberal dan trendi. Para pemainnya pun sebagian besar bukan tergolong muslim taat (hal. 83). Namun, tak satu pun film islami yang dibuat setelah *Ayat-Ayat Cinta* yang mampu meledak seperti film tersebut.

Dalam Bab 2-3 , tren busana muslimah juga menjadi sorotan. Berawal dari bentuk pembangkangan politik terhadap negara



yang merepresi gerakan politik Islam mulai akhir 1980-an, menjadi tren mode yang luas sejak tahun 1990-an, lalu bermetamorfosa kembali sebagai kepatutan politik sejak peralihan abad. Belakangan, bahkan, jilbab menjadi tren bagi perempuan yang menjadi tersangka saat muncul di pengadilan. Contoh: Nunun Nurbaeti, Yulianis, dan Neneng Sri Wahyuni. Tak hanya tersangka perempuan Muslimah, model pakaian terkenal asal Australia, Michelle Leslie juga memakai jilbab saat di pengadilan. Taktik ini tampaknya diyakini mampu memengaruhi hakim. Walau akhirnya tersangka-tersebut tetap divonis penjara, namun relatif ringan dibanding tuntutan (hal. 72).

Fenomena meledaknya film *Ayat-Ayat Cinta* beserta pengaruhnya dan tren busana muslimah di Indonesia menunjukkan tak adanya pertentangan antara kapitalisme dan ketakwaan beragama. Keduanya dapat berjalan berdampingan. Demikian pula akun-akun dakwah di media daring yang mudah diakses di internet.

Perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan Islam di Indonesia menunjukkan adanya upaya menghadirkan identitas Islam yang lebih cair, mengalir seiring zaman, tapi tetap berusaha tak menjauh dari lingkaran syariat. Proses ini juga sesuai dengan pemikiran Bayat yang dinukil Ariel mengenai Post Islamisme, "...Proyek ini ingin mengawinkan antara pilihan individu dan kebebasan, antara demokrasi dan modernitas." (hal. 59).

Namun sekali lagi, post-Islamisme tak hadir tiba-tiba. Dia tumbuh dari runutan sejarah yang mendahuluinya. Sebagai salah satu elemen yang mengalami represi selama masa Orba, dan hanya jadi tunggangan sejak akhir 1980-an, Islam dengan sendirinya meredefinisi identitas dan mengejawentahkan eksistensinya sejak keruntuhan Rezim Orba pada tahun 1998.



Pada saat yang sama, kelas menengah Muslim kian tumbuh pesat seiring membaiknya taraf ekonomi mereka. Era demokrasi dan kebebasan yang berjalan beriringan dengan modernitas, globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi perkembangan baru yang mau tidak mau harus direspons dan diadaptasi. Tiga situasi tersebut telah mendorong Islam di Indonesia merumuskan kembali identitas dirinya, yang tak lagi sama dengan era sebelumnya.

Sayangnya, dalam subbab ini, Ariel kurang menyinggung mengenai perkembangan lain dalam islamisme di Indonesia dalam satu dekade terakhir, yang tak hanya diwarnai dengan tampilan identitas yang cair, tapi sebaliknya juga diwarnai kian menguatnya gerakan puritanisme. Munculnya media-media bernuansa islami yang menebarkan kebencian kepada kelompok-kelompok di luar mereka, dan intoleransi yang terus bertahan, serta pengiblatan secara berlebihan terhadap tata cara berbudaya kearab-araban, khususnya Arab Saudi, menjadi tarung wacana yang keras antarpemeluk Islam di Indonesia yang sangat beragam.

### **Masa Lalu yang Dicincang dan Dilupakan**

Seiring jatuhnya Soeharto, tak serta merta propaganda anti-komunis musnah sama sekali, melainkan tetap berlanjut hingga sekarang. Tidak hanya oleh aparat negara, beberapa organisasi kemasyarakatan pun turut bertindak sebagai agen perlawanan terhadap upaya kelompok-kelompok reformasi untuk meluruskan sejarah peristiwa 1965, baik melalui sinema maupun kegiatan intelektual. Beberapa peristiwa menunjukkan ini. Pada 5 Maret 2007, Kejaksaan Agung melarang 26 buku teks sejarah karena telah menghilangkan kesalahan komunis dalam beberapa konflik politik (hal. 124). Pada 2009, sebuah stasiun radio di Solo menjadi sasaran ancaman dan protes kelompok yang

menamakan diri Korps Hizbullah Divisi Sunan Bonang karena memutar lagu *Genjer-Genjer* (hal. 127). Runutan akar sejarah serta konteks sosial hari ini menjadi penting dalam membongkar bagaimana wacana seputar peristiwa 1965-66 dalam film-film pasca Orde Baru tidak sepenuhnya berbalik arah.

Meskipun terjadi perkembangan media baru di Indonesia dan meluasnya ruang untuk kebebasan berekspresi, hanya segelintir film pasca-1998 yang meninjau ulang tragedi 1965. Dari seribu lebih film pendek dan dokumenter per tahun, hanya sekitar selusin judul yang secara khusus meninjau ulang periode paling kontroversi ini.

Hampir semua film mengenai peristiwa 1965 yang dibahas di buku ini diproduksi oleh orang-orang yang berpengalaman dan berkemampuan teknis serta komitmen politik di atas rata-rata. Namun sayangnya, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan, film-film tersebut hanya memiliki dampak terbatas pada publik, dan amat terbatas untuk bisa mengguncang propaganda Orba tentang 1965. Keterbatasan tersebut terletak pada besarnya kesulitan untuk membuat film dengan tema yang sangat peka ini. Ada kekangan politik di sisi lain, tetapi juga masih ada ketidaksiapan penonton Indonesia menghadapinya.

Beberapa contoh film, yang mencoba meluruskan narasi sejarah peristiwa 1965 telah dicoba diproduksi, mulai dari *Puisi Tak terkuburkan* (1999), *Plantungan*, *Tjidurian 19*, *Kawan Tiba Senja: Bali Seputar 1965*, *Penari*, *Jembatan Bacem*, hingga *The Look of Silence (Senyap)*. Tetapi, meski kualitasnya relatif membaik, film-film yang ada belum memiliki daya guncang yang kuat sebagai penanding narasi budaya Orba dalam propaganda sejarah peristiwa 1965 versi mereka. Beberapa film cenderung relatif monoton, sedangkan kebanyakan umumnya terlepas dari konteks-konteks khas pada masa itu, seperti pertarungan elite

politik, pertarungan ideologi, perang dingin, konflik sosial, dan krisis ekonomi, yang terjadi pada masa itu (hal.152)

Tantangan ke depan untuk dunia sinema terkait peristiwa 1965 adalah bagaimana membangun sebuah karya yang mampu mendiseminasi fakta sejarah secara lebih jernih dan mendudukkan persoalan secara semestinya, sekaligus tetap diterima masyarakat. Hal tersebut membutuhkan kerja keras dan upaya kreatif yang tak kenal lelah karena menyangkut kompleksnya persoalan.

Film masih menjadi medium yang ampuh karena karakternya (audiovisual) dan daya jangkau yang luar biasa di berbagai lapisan kelas masyarakat. Perannya sangat strategis dalam membangun identitas keindonesiaan baru yang tak abai sejarah dan peduli untuk meluruskan pembengkokan. Tapi, tetap dalam kerangka budaya populer yang memberi kenikmatan bagi audiens.

Pembuatan film 1965 sebagai tandingan narasi Orba juga menghadapi kenyataan amnesia sejarah yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia, serta kekurangpedulian sebagian generasi masa kini untuk menemukan atau memahami sejarah bangsanya yang benar dan keluar dari bayang-bayang sejarah versi Orba. Kurikulum sejarah di dunia pendidikan masih monoton, sedangkan elite politik cenderung lebih nyaman dengan narasi sejarah versi otoritarian yang membuat mereka merasa lebih aman dalam *status quo*.

Terus memunculkan Peristiwa 1965 dalam wacana arus utama bukan sekadar tentang perjuangan memori politik, tetapi juga menyuguhkan narasi untuk membangun ingatan yang baru. Hal ini karena pemberangusan sejarah yang begitu panjang membuat banyak orang di Indonesia benar-benar tidak tahu versi

sejarah yang sebenarnya.

## **Etnis Tionghoa dan Demam Budaya Populer Asia**

Selain politik pembasmian, Orde Baru juga terampil menerapkan politik penyingkiran terhadap kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan identitas sosial. Dalam hal ini, Etnis Tionghoa adalah korban dari jenis politik penyingkiran Orba tersebut. Mereka, selama masa itu, kerap dikaitkan dengan golongan kiri. Digolongkan sebagai para liyan dan kerap mengalami kekerasan massa.

Namun, secara ekonomi, kelompok ini etnis yang istimewa. Ini tampak jelas dari dominasi mereka di tiga kota utama, Jakarta, Medan, dan Surabaya.

Merujuk kepada hasil penelitian Krishna Sen, Ariel menyebutkan adanya keganjilan dalam industri film nasional kaitannya dengan Etnis Tionghoa. Meski Etnis Tionghoa telah meletakkan landasan industri film pada tahun 1930-an, dan industri modal Tionghoa menjadi tulang punggung industri film sepanjang sejarahnya. Namun, sesudah menonton lebih dari 200 judul film Indonesia masa Orba, Sen menemukan hanya satu judul (yaitu Putri Giok, 1980) yang menampilkan keluarga Indonesia-Tionghoa. Namun, keluarga ini hanya muncul untuk dijelek-jelekan sebagai masalah bagi bangsa, sehingga perlu penghapusan (hal. 214).

Teguh Karya yang dikenal sebagai sutradara kondang adalah bagian dari manusia Indonesia yang terimbas stigma etnis Tionghoa setelah peristiwa G 30 S 1965. Banyak orang tak tahu bahwa Teguh Karya berdarah Tionghoa dengan nama asli Steve Liem. Dia memang tak pernah memunculkan etnis Tionghoa dan ketinghwaan dalam film-filmnya. Orang-orang di sekelilingnya, menurut penjelasan dalam buku Ariel ini, bahkan enggan membicarakan ketionghwaan Teguh Karya selain dalam bisik-

bisik. Teguh Karya sendiri sebenarnya dengan ringan mengakui ketionghoaannya tapi dia memang tak mau memunculkannya.

Mengutip Sen, Ariel mengatakan, kehadiran sinematis dari etnis minoritas Tionghoa tumbuh luar biasa segera menyusul kejatuhan rezim Orba, dengan karya-karya yang diproduksi oleh seniman yang berasal dari luar etnis tersebut. Namun, stereotip lama yang rasis terkait Etnis Tionghoa masih bertahan hingga sekarang. Film *Ca-bau-kan*, menurut Sen, adalah contoh yang mencerahkan dalam hal ini, di mana tokoh utamanya orang Tionghoa, yang filmnya menggambarkan keinginan untuk menggugat penghapusan atau penistaan terhadap kelompok etnis ini (hal. 236).

Beberapa film yang diedarkan beberapa tahun belakangan lebih membesarkan hati. Lebih dari sekadar memperlihatkan kesadaran menerima perbedaan etnis, kelas menengah muda Indonesia di layar maupun di luar layar tampak lebih nyaman bercampur dengan orang beragam latar belakang etnis, bahasa, dan kebangsaan. Kesadaran keberagaman ini telah muncul sejak awal 1990-an. Maka tak heran, kekerasan rasial pada tahun 1998, mendapat gelombang kutukan keras dari kelas menengah negeri ini. Namun, bukan berarti prasangka dan ketegangan rasial telah hilang sama sekali. Hanya saja, saat ini publik lebih sibuk dengan konflik antar dan intraagama.

Di tengah membaiknya kesadaran menerima perbedaan etnis, fenomena K-pop, sebuah budaya populer asal Korea Selatan, mampu memberdayakan penggemar, yang kebanyakan merupakan perempuan muda, sehingga dapat mengganggu kelompok konservatif dominan. Banyak orang Indonesia menemukan keasyikan dari kegiatan menjelajahi dan mengungkapkan sebuah identitas baru sebagai seorang Asia yang modern dan kosmopolitan. K-Pop menjadi tren populer Asia

yang paling banyak digandrungi.

Kebanyakan yang diwawancarai dalam buku ini adalah mahasiswi berusia 18 tahun hingga 30 tahun. Yang lain, sejumlah sarjana dan kaum profesional yang baru memulai karirnya. Pada sebuah acara kumpul yang diselenggarakan oleh penggemar musik Korea (K-Pop), salah seorang asisten penulis mewawancarai nenek berusia 77 tahun yang datang dengan cucunya yang masih remaja. Mereka sama-sama punya kaitan emosional dengan para bintang artis itu, dan sama-sama mengikuti perkembangan berita tentang K-Pop di seluruh dunia.

Namun, diakui oleh Ariel, K-Pop bukanlah satu-satunya budaya populer Asia yang ngetren di era setelah Soeharto turun.

Sebelumnya, publik Indonesia disuguhi betapa ngetopnya serial *Meteor Garden*, drama televisi Taiwan, pada awal dekade 2000-an. Sebuah serial yang berkisah tentang kehidupan sehari-hari dan cinta remaja sekolah menengah, komedi percekcoakan dan hubungan romantik yang keras kepala antara sepasang kekasih. Model kisah yang sama juga diangkat oleh serial *Full House* (2004), drama seri asal Korea.

Penolakan berulang-ulang atau pengungkapan alternatif hubungan satu sama lain adalah gaya menonjol drama-drama Asia Timur. Kerja keras dan pengekan diri ditampilkan sebagai suatu kebijakan moral dalam dirinya sendiri ketimbang sebagai cara untuk segera meraih imbalan dengan baik. Bagi penonton di Indonesia, kebajikan kerja keras dan pengekan diri ini memiliki landasan keagamaan yang kuat (hal. 262). Masih perlu diteliti lebih jauh, apakah hal tersebut yang membuat perempuan muda kelas menengah perkotaan di Indonesia tertarik dengan drama televisi kontemporer dari Asia Timur. Merujuk kepada pandangan Lee Geun, Ariel menyebutkan, K-Pop amat blasteran, hybrid, dan transnasional, serta tak

mewakili kebudayaan Korea (hal. 265). Hal tersebut dinilai sebagai keuntungan tersendiri bagi penyebaran K-Pop ke segala penjuru dunia. Namun, sejumlah studi juga menyebutkan, minimnya adegan erotis dalam drama-drama Asia Timur, membuatnya lebih disukai oleh penonton Indonesia.

Menguatnya tren budaya populer dari Asia Timur juga mendorong peningkatan konsumsi produk-produk yang berkaitan dengan budaya tersebut, seperti keping DVD, souvenir, fashion, serta tata busana dan rambut. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat secara langsung di pasar, mal, dan lapak-lapak dagang acara hiburan dadakan di pinggiran. Tidak hanya kelas menengah perkotaan yang mapan, tetapi kelas menengah atau bahkan kelas bawah pun juga tak sedikit yang mencoba mengikuti idola barunya. Mereka yang mampu mapan mampu mengakses produk-produk seperti DVD yang asli. Sementara, mereka yang di pinggiran hanya mampu mengakses yang bajakan. Perdagangan CD dan DVD bajakan seiring meledaknya Meteor Garden, juga kian meluas. Situasi ini menempatkan idola baru yang disambut gempita dan dipublikasi media secara luas dan massif, mendorong konsumsi yang luas pula, dan bahkan, lintas kelas sosial. Stratifikasi pasar pun akhirnya terbentuk berdasarkan kelas ekonomi.

Idola-idola baru versi Asia Timur ini menawarkan imaji baru tentang kerupawanan. Sosok-sosok artis seperti Dao Ming Tse atau bintang-bintang dari ranah K-POP tiba-tiba membentuk tren baru tentang “orang ganteng”. Dulu, di era 1990-an, kita tak pernah membayangkan sosok ganteng berada di luar kategori kemachoan. Kini, seiring demam budaya populer Asia Timur, perempuan muda kelas menengah bisa menyebut pria bergincu, bermake-up, dengan kulit terawat khas salon, sebagai sosok ganteng dan layak dimimpikan.



Salah satu bagian menarik dalam bab ini adalah ketika penulis mengaitkan fenomena K-pop dengan sejarah pemusnahan etnis Tionghoa pada era Orba yang telah ia bahas pada bab sebelumnya. Ariel menyatakan bahwa, semuanya berubah pada dekade pertama abad ini, tak hanya dibuktikan dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang direstui oleh negara sesudah kejatuhan Orde Baru, tetapi juga mengalirnya budaya populer Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan setiap hari (hal. 267).

Hal ini akan berkembang menjadi sesuatu yang besar melawan status quo. Meskipun demikian, energi baru dari gelombang budaya populer Asia Timur ini tak dapat begitu saja berubah menjadi tren atau gerakan politik progresif (hal. 277).

Pemaparan bab tentang mengemukakan budaya populer Asia Timur di Indonesia pasca 1998 memunculkan pertanyaan: apakah hal tersebut bagian dari pembentukan identitas baru dan cara baru menikmatinya seiring runtuhnya rezim otoritarian, atau sekadar lanjutan dari timbul tenggelemnya tren budaya populer asal Asia Timur. Sebab, pada era 1990-an, publik kelas menengah perkotaan di Indonesia sudah menggilai sejumlah film-film atau serial asal Hongkong, seperti *Return of the Condor Heroes*, yang melejitkan nama Andi Lau. Lalu, di era 1990-an juga mengemuka di benak publik remaja putri kelas menengah perkotaan zaman itu, bahkan, kelas lebih bawah, nama bintang pop mandarin, seperti Aaron Kwok dan Jacky Cheung.

### **Penjinakan Politik**

Pada bab “Dari Layar ke Politik Jalanan” atau bab terakhir di buku ini, Ariel membahas bagaimana budaya populer yang hadir usai runtuhnya Soeharto, bertemu dengan liberalisasi politik di era Reformasi. Fenomena yang terjadi di sepanjang perhelatan Pemilu 2009 menjadi fokusnya dalam melihat pertemuan

tersebut.

Liberalisasi politik yang lebih luas di masyarakat tak selalu berarti pemberdayaan massa. Hal ini ironi jika dibandingkan dengan situasi zaman Orba, di mana tekanan dan propaganda yang gencar dan kuat justru menyebabkan segarnya oposisi, propaganda tandingan, dan perlawanan terhadapnya. Sebuah pendekatan yang lebih halus berhasil dilakukan melalui budaya layar, baik media lama maupun baru, yang tersebar dengan baik. Akibatnya, massa di Indonesia kini tercerai berai dan dijinakkan secara sukarela (hal.80).

Hal ini tak lepas dari masih kuatnya lingkungan sosial yang masih mengedepankan komunikasi lisan. Itulah mengapa, orang Indonesia lebih peka menerima pesona gambar gerak dan menjadi lebih tanggap kepada kamera video ketimbang mesin pengolah kata. Meski pada dasarnya Indonesia memiliki angka melek huruf yang tinggi (di atas 90 persen), namun angka tersebut kecenderungan untuk mengenali ketimbang menggunakannya secara optimal. (hal 284)

Komunikasi yang lebih mengedepankan lisan membutuhkan lebih banyak tatap muka. Sementara, kehidupan sehari-harinya lebih komunal. Kecenderungan ini menemukan ungkapannya dalam politik di jalanan. Inilah yang terjadi selama pekan-pekan kampanye ketika Orba berkuasa. Dari perspektif sejarah demikian, kita dapat mengajukan argumen bahwa kampanye Pemilu 2009 (dan dalam skala lebih kecil Pemilu 2004) merupakan penyimpangan besar-besaran normal dari dua dekade sebelumnya. Perubahan ini merupakan perwujudan dari apa yang diinginkan, tapi tak mampu dicapai oleh Orba, yaitu penjinakan massa secara umum dengan mencerai-beraikan mereka.

Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam buku ini Ariel mencoba menelusuri perubahan peraturan dalam Pemilu 2009 dibanding pemilu sebelumnya, yaitu tak diterapkannya lagi nomor urut calon sebagai penentu keterpilihan. Di bawah aturan baru ini, tak ada pilihan lain bagi para politisi selain bekerja keras menjangkau suara guna mempertahankan posisinya. Situasi ini membuat makin banyak para pesohor; artis, selebritas, olahragawan, yang turut bersaing merebut kursi parlemen. Ada 61 pesohor dari sekitar 11.000 yang bertarung, dan sebagian besar sukses terpilih. (hal.286)

Dampak lain perubahan aturan itu adalah makin besarnya hasrat warga biasa, termasuk yang miskin sumber daya ekonomi dan popularitas, serta miskin pengalaman, untuk turut bertarung dalam pemilu, seperti tukang becak, tukang ojek, juru parkir, dan sopir angkot. Tak pelak, Pemilu 2009 menjadi pemilu terbesar di dunia, di mana 11.219 calon bersaing memperebutkan 560 kursi di DPR; 32.263 memperebutkan kursi di DPRD provinsi; dan 246.588 calon memperebutkan kursi DPRD kabupaten/kota. Jumlah yang begitu besar, memunculkan sinisme masyarakat terkait moralitas dan motivasi para calon. Panggung dipenuhi dengan peragaan dan pagelaran kampanye politik. Mulai dari kampanye melalui pengumpulan massa, hingga maraknya kampanye-kampanye tunggal oleh para calon. Meski tak bisa dihakimi sebagai bentuk mimpi di siang bolong, apabila melihat area politik yang lebih luas, Ariel menyebut situasi tersebut sebagai kedunguan yang menyedihkan. (hal.288)

Dalam bab terakhir ini, Ariel juga mencoba menggambarkan bertemunya identitas dan kenikmatan pada fenomena unjuk kekuatan massa dalam pemilu. Peragaan massa yang besar, meraksasa, pawai yang panjang, sejumlah perilaku yang melawan hukum ketertiban selama pawai dan kampanye, seperti

melanggar lalu lintas dan dengan knalpot sepeda motor yang dicopot, truk yang ditumpangi muatan berlebih, dan suara musik dengan pengeras suara yang memekakkan telinga. Sesuatu yang dianggap remeh oleh kalangan menengah perkotaan, tapi penting bagi massa yang umumnya dari kalangan menengah ke bawah. Mereka seperti tidak peduli bahwa politisi hanya memberikan janji palsu, kemunafikan, kontradiksi dan fiksi. Massa menelan semuanya mentah-mentah, tanpa terkecoh. (hal. 294)

Lima tahun sekali massa yang diasingkan dari politik dan dieksploitasi secara ekonomi ini menjadi subyek anonim tertinggi yang mendominasi ruang publik selama beberapa hari, beberapa malam. Mereka merayakannya dengan khazanah diskursif serupa yang mereka pelajari dari aparat negara, seperti warna-warni mencolok, suara berisik, pawai massa, pameran kekuatan maskulin, dan kekerasan agresif yang pada kesempatan lain lebih banyak dimonopoli negara. (hal.292). Pertunjukan massa itu membangkitkan histeria luas karena dimuat dan ditayangkan di media-media arus utama maupun media sosial.

Peragaan massa yang cenderung bersifat subversif tanpa sengaja tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang ahistoris. Ariel menunjukkan, rezim Orba lahir dan memperoleh kekuasaannya melalui keberhasilannya memicu histeria massa dalam melawan dan melakukan pembunuhan massal terhadap kaum kiri. Dengan dukungan terus menerus dari para pembela demokrasi liberal, rezim ini memelihara kekuasaannya. Gaya massanya sangat tipikal sekali, yaitu kepatuhan yang berlebihan, ketaatan yang riang dan amat bergaya. (hal.295)

Selain pawai massa yang maskulin, Pemilu 2009 dan segala pentasnya juga mengalami feminisasi. Pemilu dikomodifikasi sebagai tayangan hiburan, ketimbang pendidikan politik dan

propaganda. Aneka macam hiburan digelar untuk pesta demokrasi ini mulai dari pertunjukan musik artis terkenal hingga peragaan busana di desa. Hiburan menjadi raja tak tertandingi dari seluruh periode kampanye pemilu. (hal. 303)

Individualisasi, feminisasi, dan juga pengerahan massa yang macho, telah mengarahkan kepada fenomena baru. Tak hanya massa menjadi terpecah-pecah dan tersebar, tapi tekanan jiwa yang berat menimpa banyak calon yang gagal. Rumah sakit jiwa menjadi penuh, dan di tempat lain tak sedikit yang bunuh diri. Luasnya partisipasi politik dalam pemilu yang sangat liberal itu menghadirkan kesedihan pada akhirnya. (hal. 303-304)

## Penutup

Buku *Identitas dan Kenikmatan* ini memiliki catatan etnografis yang lengkap. Dia merangkum banyak hal yang terkait dengan budaya populer, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun justru dilupakan dalam kajian-kajian utama tentang lanskap sosial dan politik Indonesia di era demokratisasi.

Pencarian identitas adalah fitrah kuno manusia yang berkembang sejak zaman prasejarah. Pencarian akan hal tersebut tak akan pernah usai. Dalam setiap zaman akan terus terjadi upaya mengonstruksi sekaligus mendekonstruksi identitas. Dia tumbuh, berkembang, meluruh, dan tumbuh lagi dalam bentuk baru ataupun modifikasi dari yang lama dari hasil tarif menarik atau relasi perkembangan berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Buku ini menunjukkan, dalam budaya layar yang dipandang rendahan, profan, dan superfisial tersebut ternyata terdapat gairah, energi, dan upaya terus menerus untuk turut merumuskan identitas baru dari rangkaian centang perenang pertemuan masa lalu dan masa kini.

Namun, dunia budaya populer sangat dinamis, cepat berubah, dan mudah bertransformasi. Karena itu, kajian yang terangkum dalam buku *Identitas dan Kenikmatan* ini tidak bisa tidak harus terus turut berkembang seiring perubahan. Kian massifnya peran dan pengaruh media digital, baik media daring arus utama maupun media sosial dalam mendiseminasi informasi, mencipta opini, memadat-padankan gaya hidup dan perilaku, serta membangun citra sosial politik, khususnya sejak Pemilu 2014, menjadi sesuatu yang mau tidak mau dan tidak bisa tidak harus dijadikan telaah yang lebih maju dari kajian yang telah dihasilkan dalam buku ini.

Satu tahun terakhir adalah peragaan yang telanjang bagaimana kelas menengah urban yang mendominasi suara dan geliat media-media sosial tak hanya sebetuk kelas yang sekadar menikmati dan menonton hadirnya identitas dalam khazanah budaya populer Indonesia yang baru. Mereka kini tumbuh semakin politis, dengan daya pengaruh yang besar dalam kebijakan publik untuk mengimbangi kekuatan oligarki. Meski sayangnya, daya pengaruh yang ada masih seputar kebijakan-kebijakan politik yang minor, belum terhadap persoalan-persoalan yang lebih struktural dan besar.

### **Sumber Tambahan**

Mc Robbie, Angela, *Postmodernism and Popular Culture*, Routledge, London, 1994

Yusuf Lubis, Akhyar, *Pemikiran Kritis Kontemporer*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

Heryanto, Ariel (editor). *Budaya Populer di Indonesia: Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*, Jalasutra, Yogyakarta, 2012

Menoh, B Gusti, *Agama Dalam Ruang Publik*, Kanisius,

Yogyakarta, 2015